

Inovasi Kebijakan Pendidikan Tinggi di Era Society 5.0 sebagai Solusi Kenaikan UKT

Dwi Putri Vidiastuti¹, Muh. Adzam²

¹Universitas Gadjah Mada, Gedung Masri Singarimbun Jln. Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta,

²STIE Yogyakarta, Jl. Seturan Raya, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman

e-mail: dwijputri2020@mail.ugm.ac.id (penulis korespondensi)

Abstrak

Di era Society 5.0, kajian inklusif dalam ilmu sosial, politik, dan humaniora, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi, menjadi semakin mendesak. Merespons pernyataan Kemendikbud yang menganggap pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier dan menghadapi isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus di Indonesia, muncul tantangan bagi pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata. Studi ini mengeksplorasi berbagai inovasi digital seperti Kebijakan endowment fund (dana abadi), kebijakan blended learning (pembelajaran campuran), dan Kebijakan student loan (pinjaman biaya kuliah). Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Melalui analisis kebijakan, peran e-government, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kajian ini bertujuan memberikan panduan bagi strategi pemerintahan yang responsif dan adaptif di era digital. Kesimpulannya, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat komitmen negara terhadap pendidikan tinggi yang terjangkau dan inklusif.

Kata kunci: Inovasi, Kebijakan, Pendidikan Tinggi, Society 5.0, dan Kenaikan UKT.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi (Marlinah, 2019). Di era *Society 5.0*, yang diinisiasi oleh Jepang, terdapat fokus untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi digital dengan kehidupan masyarakat guna menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. *Society 5.0* lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, dan teknologi robot dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi maupun pendidikan (Hamu et al., 2023).

Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, salah satu tantangan utama adalah aspek pembiayaan atau UKT (Uang Kuliah Tunggal), biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi di Indonesia. Jika kenaikan UKT terus berlanjut, hal ini dapat membatasi aksesibilitas pendidikan bagi sebagian besar masyarakat. Salah satu faktor utama penyebab kenaikan UKT adalah peralihan status PTN (Perguruan Tinggi Negeri) menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) melalui UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, status tersebut akan membebankan pembiayaan pendidikan pada perguruan tinggi, biaya pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara. Perguruan tinggi diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan, hal ini menyebabkan beberapa perguruan tinggi menaikkan UKT untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Selain itu, pada Pasal 76 ayat (2) huruf C UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pemerintah dalam melakukan pemenuhan terhadap hak mahasiswa yang kurang mampu memberikan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau setelah mendapat pekerjaan, dimana hal ini semakin memberatkan mahasiswa dengan bunga pinjaman. Di berbagai negara yang lain seperti Amerika dan Australia, solusi untuk memberikan keringanan bagi pembiayaan UKT untuk mahasiswa bisa dilakukan melalui *Income Share Agreement (ISA)* seperti yang dilakukan di Australia (Holliday & Gide, 2016). Namun, tentu saja ISA tidak relevan jika diterapkan di Indonesia, mengingat sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah kuliah.

Salah satu upaya yang dilakukan perguruan tinggi untuk meringankan kenaikan biaya UKT adalah dengan memberikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa prestasi seperti yang dilakukan UIN Sumatera Utara maupun Universitas Negeri Padang (UNP), UIN Sumatera Utara memanfaatkan layanan zakat melalui unit pengumpul zakat, sedangkan UNP memberikan potongan 50% bagi mahasiswa tingkat akhir (Ardiansyah et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mendukung pendidikan tinggi melalui alokasi dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta berbagai program beasiswa, namun alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi di Indonesia hanya 0,6-1,6 persen dari total APBN. Angka tersebut jauh lebih rendah dari rekomendasi UNESCO yakni 2 persen dari anggaran negara. Kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah mendapat resistensi signifikan dari masyarakat. Kenaikan UKT dianggap tidak seimbang dengan penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa pendidikan tinggi akan menjadi semakin tidak terjangkau bagi banyak calon mahasiswa, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, karena masyarakat menilai kenaikan UKT sebagai bentuk komersialisasi pendidikan. Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek, Tjitjik Tjahjandarie, yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib (Aditya & Rastika, 2024).

Dengan semakin meningkatnya tuntutan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi, diperlukan inovasi kebijakan yang dapat menekan biaya UKT tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Era Society 5.0 menawarkan berbagai peluang untuk menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perguruan tinggi. Penggunaan teknologi canggih dalam proses pembelajaran dan administrasi, penerapan model pembiayaan yang inovatif, serta kerjasama yang lebih erat dengan sektor industri dan pemanfaatan sumber daya secara optimal merupakan beberapa strategi yang dapat diambil..

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *library research*. Paradigma interpretatif diterapkan untuk memahami makna dari fenomena sosial terkait inovasi kebijakan pendidikan tinggi di era Society 5.0. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti jurnal akademik, laporan kebijakan, dan dokumentasi implementasi kebijakan di institusi pendidikan tinggi. Analisis data berupa analisis deskriptif dan komparatif, serta interpretasi hasil untuk memberikan wawasan mengenai inovasi kebijakan yang dapat menekan biaya UKT. Unit analisis adalah kebijakan pendidikan tinggi yang diterapkan untuk mengatasi kenaikan UKT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa inovasi kebijakan pendidikan tinggi di era Society 5.0 yang berpotensi menekan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Berikut adalah beberapa inovasi yang ditemukan beserta analisis dampaknya terhadap biaya pendidikan:

a. Kebijakan *Endowment Fund* (Dana Abadi)

Investasi dana abadi merupakan salah satu inovasi kebijakan yang diusulkan untuk mendukung keberlanjutan finansial perguruan tinggi di Indonesia. *Endowment fund* (dana abadi) adalah dana yang diinvestasikan dengan tujuan agar hasil investasinya dapat digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan perguruan tinggi secara berkelanjutan tanpa harus meningkatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan sumber pendapatan alternatif yang stabil bagi perguruan tinggi, sehingga dapat mengurangi beban finansial mahasiswa. Alokasi 2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk pendidikan, di mana 2% dari alokasi tersebut secara khusus digunakan untuk pendidikan tinggi.

b. Kebijakan *Blended Learning* (Pembelajaran Campuran)

Blended learning merupakan pendekatan pendidikan yang menggabungkan materi pembelajaran daring dengan peluang interaksi online, serta metode pembelajaran tradisional di dalam kelas. Pendekatan ini tetap membutuhkan kehadiran fisik dari pengajar dan siswa. Di sisi lain, *blended learning* juga diterapkan dalam pengembangan profesional dan pelatihan, namun sangat bergantung pada konteks, sehingga sulit untuk menemukan definisi yang seragam (Hidayah et al., 2020). *Blended learning* juga memberikan pendekatan yang bisa meningkatkan mutu pembelajaran dengan menggabungkan dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Indah et al., 2024).

Dalam melaksanakan *blended learning*, terdapat berbagai kelebihan serta tantangan seperti yang dijelaskan oleh (Achmad Firmansyah et al., 2023). *Blended Learning* meliputi kemampuannya sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dapat diterapkan sesuai dengan rencana pembelajaran yang meliputi kehadiran, orientasi, materi, dan evaluasi, serta telah terbukti efektif. Pendekatan pembelajaran campuran ini akan meningkatkan peluang kerja sama, menjadi model keberhasilan tidak hanya dalam persaingan tetapi juga dalam kolaborasi. Untuk mengadopsi fase pendidikan baru ini, seluruh pihak harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, termasuk pendidik yang harus terbuka terhadap perubahan.

1. Implementasi *Blended Learning* di Perguruan Tinggi

Universitas Harvard dan Massachusetts Institute of Technology (MIT) telah bekerja sama untuk menggunakan platform edX sebagai bagian dari inisiatif *Blended Learning* mereka. EdX adalah platform pembelajaran daring terkemuka yang menyediakan akses ke kursus-kursus dari berbagai universitas ternama di seluruh dunia. Dengan menggunakan edX, Harvard dan MIT dapat menghadirkan materi-materi pembelajaran yang berkualitas tinggi kepada mahasiswa mereka secara daring. Melalui platform edX, kedua universitas dapat mengintegrasikan materi pembelajaran daring ke dalam kurikulum mereka. Mahasiswa dapat mengakses kuliah-kuliah online, membaca materi, dan mengerjakan tugas secara mandiri melalui platform ini. Selain itu, edX juga menyediakan berbagai fitur interaktif, seperti forum diskusi dan kuis online, yang memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan staf pengajar.

Penggunaan edX sebagai bagian dari *Blended Learning* memungkinkan Harvard dan MIT untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran mahasiswa. Mereka dapat menggabungkan pembelajaran daring melalui edX dengan sesi tatap muka yang terarah, seperti diskusi kelompok dan praktikum, untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang komprehensif dan interaktif. Dengan demikian, platform edX menjadi salah satu alat yang penting dalam upaya kedua universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka melalui *Blended Learning* (Shirokolobova, 2024).

UNU Pasuruan untuk mengatasi permasalahan pro kontra dalam perkuliahan secara *blended learning* adalah membuat kebijakan baru yaitu perkuliahan ganjil genap, yang mana pada tanggal ganjil perkuliahan dilakukan secara tatap muka dan pada tanggal genap perkuliahan dilakukan secara online melalui google meet, zoom dan sebagainya (Achmad Firmansyah et al., 2023).

2. Dampak *Blended Learning* terhadap UKT

Penurunan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dapat berdampak positif terhadap *Blended Learning* dengan mengurangi beban finansial mahasiswa melalui beberapa cara. Pertama, dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring, institusi pendidikan dapat mengurangi biaya operasional, seperti biaya bangunan dan perawatan fasilitas fisik, sehingga dapat mengurangi beban UKT yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Kedua, *Blended Learning* memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran dari mana saja, mengurangi biaya transportasi dan akomodasi yang biasanya diperlukan untuk hadir secara fisik di kelas. Selain itu, fleksibilitas waktu dalam *Blended Learning* memungkinkan mahasiswa untuk bekerja paruh waktu atau melakukan kegiatan lain secara fleksibel, yang dapat membantu mereka mendapatkan pendapatan tambahan untuk mengurangi beban biaya pendidikan. Dengan demikian, *Blended Learning* dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi beban UKT mahasiswa dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi.

c. Kebijakan *Student Loan* (Pinjaman Mahasiswa)

Student loan atau pinjaman mahasiswa adalah salah satu kebijakan inovatif yang bertujuan untuk membantu mahasiswa membiayai pendidikan tinggi mereka. Kebijakan ini menyediakan dana yang dapat dipinjam oleh mahasiswa untuk menutupi biaya pendidikan, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), buku, dan biaya hidup. Setelah menyelesaikan pendidikan, mahasiswa diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan. *Student loan* dinilai berhasil di beberapa negara seperti, Amerika, Australia dan bahkan Nigeria. Berdasarkan hasil penelitian (Edinoh & Fatimayin, 2024) program pinjaman mahasiswa di Nigeria dianggap dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi, membantu mahasiswa kurang mampu, meningkatkan tingkat retensi, dan kelulusan di institusi pendidikan tinggi di Nigeria. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti pembayaran pinjaman, korupsi, pendanaan, keahlian personel, infrastruktur, dan emigrasi yang dapat menghambat implementasi program ini. Rekomendasi yang diberikan termasuk pemerintah harus memastikan pelaksanaan penuh program pinjaman mahasiswa di Nigeria karena program ini memiliki potensi untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Berbeda dengan Nigeria, konsep *Income Share Agreements (ISA)* sebagai model alternatif pembiayaan pendidikan tinggi semakin menarik minat, terutama di Amerika Serikat. ISA dapat mengalihkan beban pendanaan dari pemerintah ke sektor swasta, yang berpotensi membebaskan dana pemerintah untuk diinvestasikan dalam sektor pendidikan tinggi. Meskipun ISA membuat beberapa lulusan membayar lebih banyak dibandingkan dengan sistem saat ini, mereka juga menawarkan manfaat seperti hambatan masuk yang lebih rendah dan opsi pembayaran yang

fleksibel berdasarkan pendapatan. Sedangkan di Australia, sistem HECS-HELP yang ada saat ini memberikan metode pembiayaan yang nyaman dan berisiko rendah untuk kontribusi mahasiswa terhadap pendidikan tinggi (Holliday & Gide, 2016).

Student loan dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi masalah kenaikan UKT dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, skema *student loan* harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja yang tidak selalu memungkinkan lulusan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus. Oleh karena itu, skema *student loan* yang diusulkan harus fleksibel dan inklusif, dengan mempertimbangkan beberapa faktor:

1. **Pembayaran Bertahap:**
Skema *student loan* harus memungkinkan mahasiswa untuk memulai pembayaran pinjaman secara bertahap, mungkin beberapa tahun setelah lulus, untuk memberikan waktu bagi mahasiswa untuk menemukan pekerjaan dan stabilkan keuangan mereka.
2. **Fleksibilitas Pembayaran:**
Harus ada opsi pembayaran yang fleksibel yang dihubungkan dengan pendapatan mahasiswa, sehingga memastikan bahwa pembayaran pinjaman tidak menjadi beban yang tidak terbawa saat mereka belum memiliki pendapatan yang stabil.
3. **Bantuan dan Pendampingan:**
Program pendampingan dan bantuan karir harus disediakan untuk membantu lulusan dalam mencari pekerjaan dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan di pasar kerja. Peringatan Pinjaman: Bagi lulusan yang mengalami kesulitan finansial atau tidak dapat menemukan pekerjaan, harus ada mekanisme untuk memberikan peringanan atau penghapusan pinjaman.
4. **Kolaborasi dengan Industri:**
Kerjasama dengan industri dan sektor swasta dapat membantu meningkatkan peluang kerja bagi lulusan dan memastikan bahwa program *student loan* tidak hanya berorientasi pada pendanaan tetapi juga pada hasil pendidikan dan kesempatan kerja.
5. **Pendanaan Alternatif:**
Eksplorasi pendanaan alternatif, seperti dana abadi atau investasi sosial, dapat membantu mengurangi kebutuhan untuk *student loan* dan mengurangi beban hutang pada lulusan.

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja yang tidak pasti dan tantangan yang dihadapi oleh lulusan di Indonesia, skema *student loan* yang diusulkan harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak menambah beban kepada mahasiswa dan lulusan yang sudah menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan.

KESIMPULAN

Inovasi kebijakan pendidikan tinggi di era Society 5.0 menawarkan berbagai solusi untuk menekan kenaikan UKT. Implementasi *Endowment fund*, *blended learning* dan *student loan* dapat mengurangi biaya pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas pembelajaran. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada dukungan dari berbagai pihak dan penanganan tantangan yang ada. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan efisien

REFERENSI

- Achmad Firmansyah, Siti Nur Dianah, & Agus Qowiyuddin. (2023). Pro dan Kontra dalam Perkuliahan Secara Blended Learning di Program studi Pendidikan Matematika UNU Pasuruan Tahun 2023. *Jurnal Riset Rumpun Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 3(1), 158–165. <https://doi.org/10.55606/jurrimipa.v3i1.2337>
- Aditya, N. R., & Rastika, I. (2024). Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal. In *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/17/10201251/pernyataan-kemendikbud-soal-pendidikan-tinggi-sifatnya-tersier-dinilai-tak>
- Ardiansyah, M., Suharto, T., & Farid, A. S. (2022). Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(10), 4432–4441. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i10.1036>
- Edinoh, K., & Fatimayin, F. F. (2024). *Perception of Undergraduate Students on Implementation of Student Loan Programme in Tertiary Education in Nigeria*. April, 5–11. <https://doi.org/10.17605/cajssh.v5i3.1>
- Hamu, M. H. A., Kalam, A. K., Megawaty, M., Daga, R., Katti, S. W. B., Sulkipli, S., Sudirman, S., Sujatmiko, S., Didiharyono, D., Qur'ani, B., & Jaya, A. K. (2023). Are We Ready to Face Society 5.0? In *Tangguh Denara Jaya* (Issue June).
- Hidayah, N., Ahli, W., Bpsdm, M., & Penulis Korespondensi, A. (2020). Efektifitas Blended Learning Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Pencerahan*, 14(1), 1693–7775. <https://edukasi.kompas.com/read/2012/06/06/11503150/Perpaduan.Tatap.Mukadan.Kuliah>
- Holliday, S., & Gide, E. (2016). Funding Higher Education in Australia: Is it Time to Look at Income Share Agreement as an Alternative Model to Income Contingent Loans? *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 15(1), 1–13.
- Indah, N., Ningsih, W., & Yuliana, F. (2024). *Blended Learning and Hybrid Learning*.
- Marlinah, L. (2019). Pentingnya Peran Perguruan Tinggi dalam Mencetak SDM yang Berjiwa Inovator dan Technopreneur Menyongsong Era Society 5.0. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 2(3), 17–25. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/647>
- Shirokolobova, A. G. (2024). Blended learning with digital didactics in higher education. *Vestnik of Samara University. History, Pedagogics, Philology*, 30(1), 77–86. <https://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-30-1-77-86>